LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH TAHUN 2024

Jl. Natsir St. Pamuncak By Pass Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok
TELEPON: 0755 - 325390 / 082284332858

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Prima Mulia Anugrah pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

PT. BPR Prima Mulia Anugrah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR Prima Mulia Anugrah dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di wilayah kerja bank. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT. BPR Prima Mulia Anugrah didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT. BPR Prima Mulia Anugrah.

PT. BPR Prima Mulia Anugrah telah beroperasi lebih dari 12 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan.Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR Prima Mulia Anugrah selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, PT. BPR Prima Mulia Anugrah terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian *(Self Assessment)* Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	**PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH**
Alamat	**Jl. Natsir St. Pamuncak By Pass Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok**
Nomor Telepon	**0755 - 325390 / 082284332858**
Posisi Laporan	**31 Desember 2024**
Peringkat Komposit	**1**
Predikat Komposit	**Sangat Baik**
Kesimpulan / Penjelasan	**Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.**

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Desi Susanti
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
2.	Nama	:	Yoki Fauzan

Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab :

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan
b. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang
c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain
d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar idak menyimpang dari ketentuan e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain
f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital.
d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti
f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
g. Inovasi proses kredit secara digital telah diimplementasikan sejak 01 Juli 2024.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Maya Devita Azwar Anas
	Jabatan	:	Komisaris Utama

Tugas dan Tanggung Jawab :

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank
c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan
d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan

	Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	Zalfitrin
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital. d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2. e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2024. f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.		
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Modal inti BPR masih dibawah Rp 50 milyar, sehingga tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	:	Modal inti BPR masih dibawah Rp 50 milyar, sehingga tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Modal inti BPR masih dibawah Rp 50 milyar.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Desi Susanti	Rp0	0%
2.	Yoki Fauzan	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Prima Mulia Anugrah tidak ada.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Desi Susanti	-	-	0%
2.	Yoki Fauzan	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada kepemilikan saham di perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Desi Susanti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Yoki Fauzan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada keterkaitan atau hubungan dengan BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga

		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Desi Susanti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Yoki Fauzan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota direksi tidak ada keterkaitan hubungan keluarga dengan BPR				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Maya Devita Azwar Anas	Rp4.700.000.000	75.81%
2.	Zalfitrin	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Ibu Maya Devita Azwar Anas punya saham sebesar 75,81%.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Maya Devita Azwar Anas	-	-	0%
2.	Zalfitrin	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Maya Devita Azwar Anas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Zalfitrin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota dewan komisaris

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Maya Devita Azwar Anas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Zalfitrin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp27.000.000	2	Rp13.500.000
2.	Tunjangan	0	Rp0	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp27.000.000		Rp13.500.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. BPR PMA mendapatkan honor atau gaji, tunjangan dan penerimaan lainnya yang telah disahkan dalam RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi maupun Dewan Komisaris mendapat fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, THR dan fasilitas lain sudah sesuai dengan hasil RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.1 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji dewan komisaris, direksi dan pegawai sudah diatur sesuai dengan ketentuan intern maupun perundang-undangan yang berlaku	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	13 Maret 2024	2	Npl (Non Performance loans) dan Lain-lain
2.	10 Juni 2024	2	Pergantian Kepala Cabang, NPL (Non Performance Loan) dan lain-lain

3.	19 September 2024	2	Npl (Non Performance loans) dan Lain-lain
4.	10 Desember 2024	2	Tingkat kesehatan, Kinerja keuangan, Npl (Non Performance loans) dan Lain-lain
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan komisaris telah melakukan rapat 4 kali dalam setahun sesuai ketentuan yang berlaku, dan hasil rapat diputuskan dalam bentuk risalah rapat			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Maya Devita Azwar Anas	2	0	50%
2.	Zalfitrin	2	0	50%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam setiap rapat 100%				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2024 (tahun laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada PT. BPR Prima Mulia Anugrah								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tahun 2024, PT BPR Prima Mulia Anugrah tidak ada menghadapi permasalahan hukum		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
PT BPR Prima Mulia Anugrah tidak ada mengalami benturan kepentingan selama tahun 2024							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	13 Maret 2024	Sosial	Sumbangan bencana alam Pesisir Selatan	Perbarindo Sumbar	Rp500.000
2.	14 Mei 2024	Sosial	Sumbangan bencana alam galodo Agam	Perbarindo Sumbar	Rp1.000.000
3.	23 Agustus 2024	Sosial	Kegiatan HUT RI Ke 79	Pemuda Simpang Rumbio	Rp200.000
4.	04 September 2024	Sosial	Sumbangan turnamen futsal Dinas Kota Solok	Panitia Penyelenggaran Turnamen	Rp250.000
5.	18 November 2024	Sosial	Sumbangan turnamen voli SMKN 1 Kota Solok	Panitia penyelenggara SMKN 1 Kota Solok	Rp150.000
6.	04 Desember	Sosial	Sumbangan	Panitia	Rp200.000

	2024		turnamen futsal	Penyelenggara	
7.	17 Desember 2024	Sosial	Sumbangan turnamen bola antar nagari	Panitia penyelenggara	Rp200.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
BPR tidak memberikan sumbangan atau kegiatan dalam rangka politik					

Solok, 23 Januari 2025

PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH

Maya Devita Azwar Anas
Komisaris Utama

Desi Susanti
Direktur Utama